

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG UANG
DIBAYAR GABAH DI DESA METAOS KECAMATAN GUDO
KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Romlah
NIM: C02216062



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romlah
NIM : C02216062
Fakultas/Jurusan/Skripsi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN. MUI
19/DSN.MUI/IV/2001 Terhadap Hutang Piutang
Uang Yang di Bayar dengan Gabah di Desa
Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 April 2021

Saya menyatakan,




Romlah
NIM. C02216062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Romlah, NIM. C02216062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 April 2021

Pembimbing



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Romlah NIM. C02216062 ini telah dipertaharkan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Akh. Mukarram, M. Hum
Nip. 1956092319860310002

Penguji II



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag
Nip. 19700103199731001

Penguji III



Hi. Ifa Mutiul Khoiroh S.H., M.Kn
Nip. 197903312007102002

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S., M. Hum
Nip. 19911052020121017

Surabaya, 17 Juni 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan




Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
Nip. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROMLAH
 NIM : C02216062
 Fakultas/Jurusan : Syar'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syar'ah
 E-mail address : romlah.roim@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR

GABAH DI DESA METAOS KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2021

Penulis

(ROMLAH)

meningkatkan kesejahteraannya. Ketika salah satu orang atau masyarakat desa yang membutuhkan bantuan berupa uang kebanyakan orang desa meminjam uang kepada tetangganya yang sekiranya bisa meminjamkan uang kepadanya, dan pada saat terjadi hutang piutang uang ini merka membuat kesepakatan akan waktu untuk pengembalian uang yang di pinjam tersebut namun, ketika peminjam tidak bisa mengembalikan uang tersebut maka orang yang meminjamkan akan mengambil gabah yang peminjam punya.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos Kec. Gudo Kab. Jombang adalah hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah. Awal mula terjadinya hutang piutang ini adalah ketika seorang petani membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya misalnya meminjam uang untuk keperluan sekolah anaknya dan meminjam uang kepada tetangga yang bukan petani, karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan keadaannya petani sama juga dengan petani yang lain. Ketika seorang petani butuh pinjaman uang maka ia akan meminjam kepada masyarakat yang berprofesi bukan petani yaitu pedagang atau kepada tetangga yang wiraswasta namun kebanyakan dari petani tersebut meminjam uang kepada wiraswasta karena ekonominya lebih makmur atau lebih pasti pendapatannya.

Ketika hutang jatuh tempo dan penghutang tidak bisa membayar akan tetapi ia mempunyai gabah, maka orang yang memberi hutang akan mengambil gabah yang dimiliki penghutang dengan patokan harga ketika transaksi hutang piutang uang itu terjadi. Misalnya Bapak Sunaryo meminjam uang sebesar 600.000 kepada Bapak Anton pada bulan januari dan akan di

lunasi 6 bulan kedepan, pada saat Pak Sunaryo meminjam uang 600.000 bisa mendapatkan 2 kwintal gabah. Dan ketika hutang sudah jatuh tempo Bapak Sunaryo tidak bisa melunasi hutangnya tetapi Bapak Sunaryo mempunyai sisa gabah panen 6 bulan lalu dan Pak Sunaryo menawarkan akan melunasi hutangnya dengan gabah yang ia punya, karena Pak Anton kasian, Pak Anton setuju dengan tawaran Pak Sunaryo akan tetapi Pak Anton meminta dilunasi gabah 2 kwintal seperti harga gabah pada saat Pak Sunaryo meminjam uang, ketika pada saat ini harga gabah semakin naik 600.000 hanya dapat gabah 1,5 kwintal.

Adapun hal yang penulis teliti adalah bagaimana perubahan akadnya jika dilunasi dengan barang dan adanya kelebihan karena patokan harga yang lalu karena jika patokan harga yang sekarang maka hanya akan mendapat gabah 1,5 kwintal, ada kelebihan setengah kwintal lagi yang menurut penulis yang harus diteliti. Karena didalam akad hutang piutang yang ada didalam syariat Islam adalah berasaskan saling tolong-menolong dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain, menurut fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam ketentuannya juga dijelaskan apabila suatu akad hutang piutang tidak boleh melebihi dandibayar sesuai dengan pokok pinjaman awal. Akan tetapi transaksi hutang piutang yang terjadi cenderung merugikan pihak petani karena patokan harga yang diminta adalah patokan harga 6 bulan yang lalu.

Benih Padi Dengan Sistem Bayar Gabah Di Desa Masaran Kecamatan, Munjungan Kabupaten Trenggalek” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Kasus yang penulis angkat ini tentang hutang piutang benih padi yang dibayar dengan gabah. Data yang diambil oleh penulis melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa transaksi utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Masaran tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad *mukhabarah* dan juga tidak keluar dari syarat-syarat dan kaidah *urf*.¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Arifatus Safilatun Najah tahun 2015 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Uang Dengan Pelunasan Barang Di Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan*”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Penulis mengangkat kasus ini karena ingin membuktikan apakah praktek hutang piutang yang dilakukan di desa tersebut benar menurut hukum Islam atau tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian langsung di lapangan (*field research*) dan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa akad hutang piutang uang dengan pelunasan barang di Desa Kedungringin Kecamatan Keji Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan syarat hukum

¹⁴ Dani Setiawan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Benih Padi yang dibayar dengan Gabah di Desa Masaran Kabupaten Trenggalek* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

Jarak tempuh Desa Metaos ke ibukota kecamatan adalah 5 km. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 47 km dan jarak tempuh ke ibukota provinsi Jawa Timur adalah 157 km dengan fasilitas jalan kabupaten dan provinsi yang cukup memadai, namun ada sebagian jalan yang rusak atau berlubang tetapi tidak banyak mungkin hanya beberapa jalan daerah saja yang belum diperbaiki.

Keadaan alam Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang secara umum merupakan lahan pertanian atau persawahan yang cukup luas, begitupun di Desa Metaos ini mayoritas masyarakat desa ini bekerja sebagai petani dan buruh tani akan tetapi ada juga yang bekerja sebagai PNS atau pedagang namun tidak banyak. Namun hasil pertaniannya tidak begitu maksimal karena pengairan sawahnya kurang maksimal juga dikarenakan air yang didapat berasal dari sungai dan itu bergantian dengan desa lainnya dan ketika di Desa Metaos ini tidak dapat pengairan atau gilirannya sudah maka para petani akan membuat sumur kecil didekat sawah tersebut dan menaikkan airnya dengan mesin desel biasanya yang dilakukan oleh petani maka dari itu petani akan memakan banyak biaya perawatan sawahnya, didalam 1 tahun bisa memanen 4 kali panen. Sehingga sebagian besar warga masyarakat terutama generasi muda banyak yang bergerak pada sektor industri yaitu pekerja swasta, agar dapat menambah pendapatan kondisi perekonomian masyarakat.

Penelitian ini bertempat di Desa Metaos, yang mana tempat terjadinya hutang piutang uang dibayar gabah yang dilakukan oleh

membayar tepat waktu atau tidak bisa membayar hutang pada saat sudah jatuh tempo maka, orang yang memberikan hutang akan meminta pelunasan hutangnya dengan gabah karena petani masih mempunyai sisa gabah yang akan mereka gunakan sehari-harinya. Akan tetapi, si pemberi hutang akan meminta gabah dengan harga pada awal terjadinya transaksi hutang piutang diantara mereka dan yang pasti dengan seiring berjalannya waktu harga gabah akan semakin naik setiap panenya. Yang menjadi fokus pembahan penulis adalah masalah ketika si pemberi hutang meminta pelunasan dengan berupa gabah dan dengan harga yang dulu waktu terjadi hutang piutang tersebut, lalu bagaimana akadnya menurut hukum Islam dan pendapat para Ulama.

2. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Transaksi Hutang Piutang Uang Dibayar Gabah

Menurut penjelasan salah satu warga sekitar, yang melatar belakangi pelaksanaan transaksi ini sebagian besar dilaksanakan oleh seorang petani pada saat musim panen. Karena hal itu, terkadang para petani masih kekurangan biaya untuk menggarap sawah dan untuk keperluan sehari-harinya karena penghasilan para petani ini lumayan rendah sehingga mereka kadang mencari pinjaman kepada tetangga yang berprofesi bukan petani seperti wiraswasta atau pedagang di desa itu. Pinjaman uang tersebut untuk membayar buruh tani, pesemaian bibit, penanaman, pemupukan, dan pembasmian hama. Hal ini tentunya membutuhkan banyak biaya untuk mendapatkan hasil panen yang

maksimal namun terkadang panen tidak sesuai yang di harapkan oleh para petani di sana.

Dari wawancara yang lainnya, ketika para petani sudah kekurangan uang untuk biaya tersebut dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan usaha apapun akan dilakukan untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Oleh karena itu terkadang petani kekurangan biaya dan akan meminjam ke tetangga atau orang yang sekiranya bisa memberi pinjaman kepadanya. Transaksi semacam ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat disana, akan tetapi tidak selalu dibayar dengan gabah, jika orang yang berhutang mempunyai uang atau ketika jatuh tempo bisa membayar maka tidak akan di lunasi dengan gabah dan akan di lunasi dengan uang biasa menjadi selayaknya hutang piutang uang dan dibayar dengan uang. Akan tetapi ketika petani tidak panen seperti yang mereka harapkan atau tidak maksimal tidak menutup kemungkinan mereka akan meminta di bayar dengan gabah para petani.

Menurut Bapak Sulaiman yaitu tetua di Desa itu hutang piutang ini dilakukan ketika para petani tidak mempunyai solusi lagi atau bisa disebut sebagai cara terakhir mereka untuk membiayai hidup sehari-harinya atau untuk membiayai garapan sawahnya, karena ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat ketika melakukan hutang piutang ini tidak ada kesepakatan untuk di bayar gabah akan tetapi mereka sudah mengerti jika suatu saat mereka tidak bisa melunasi hutangnya maka yang memberi hutang akan memnita ganti dilunasi dengan sisa gabahnya. Tanpa kesepakatanpun

Pertamanya hutang piutang ini hanya perjanjian hutang piutang yang seperti pada umumnya dan dengan perjanjian awal hanya hutang piutang uang dan tidak ada embel-embel di bayar dengan barang atau gabah yang mereka punya, karena rata-rata yang melakukan hutang itu orang awam dan memakai akad kekeluargaan jadi tidak ada perjanjian tertulis diantara mereka hanya dilakukan dengan perjanjian yang dilakukan hanya dengan mulut ke mulut tanpa ada suatu catatan atau perjanjian tertulis antara mereka agar menjadi pedoman atau bukti terjadinya transaksi hutang piutang yang terjadi diantara mereka, sehingga jika suatu saat jika terjadi wanprestasi atau keterlambatan membayar hutang tidak ada bukti yang kuat akan tetapi kesadaran dari orang yang berhutang itu sendiri ketika sudah ditagih oleh orang yang memberi hutang.

Karena ini akad kekeluargaan atau atas asas saling percaya sehingga ketika suatu saat terjadi wanprestasi atas hutang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum satu sama lain sehingga bisa saja yang memberi hutang menagihnya dengan meminta ganti barang yang penghutang punya dan ketika itu yang penghutang punya itu gabah karena memang profesinya sebagai petani atau buruh tani.

Akan tetapi ketika hutang sudah jatuh tempo dan *muqtaridh* tidak bisa melunasi hutangnya pada saat itu juga maka *muqridh* akan meminta ganti barang yang si penghutang punya entah itu barang atau gabah yang dimilikinya akan tetapi karena rata-rata setiap petani mempunyai sisa

Bapak Poniman sudah panen dan sudah menjual gabahnya akan melunasi hutang itu tidak ada perjanjian akan dibayar gabah atau barang yang lain. Namun, ketika Bapak Bahri menagih hutangnya, dan Bapak Poniman sedang tidak ada uang atau tidak bisa melunasi hutangnya pada saat itu maka Pak Bahri akan meminta membayar dengan gabah yang Bapak Poniman punya, akan tetapi Bapak Bahri meminta gabah seharga ketika Pak Poniman meminjam uang atau berhutang.

Contoh prakteknya transaksinya dan akadnya dapat dicontohkan seperti ini, Pak Poniman meminjam uang Rp. 500.000 kepada Bapak Bahri, pada bulan Januari dan Pak Poniman berjanji akan melunasi hutangnya bulan Mei setelah Pak Poniman panen gabahnya dan menjual gabahnya dan uangnya untuk membayar hutang itu. Akad yang dilakukan di antara mereka hanya hutang piutang pada umumnya tidak ada akad yang lain dan akad hanya dilakukan dengan mulut ke mulut tidak ada pencatatan karena memang sudah bertetangga. Pada saat itu harga gabah Rp. 4000 – Rp 5000/kg sehingga Rp. 500.000 akan mendapatkan 4 sak yang isi 25 kg atau $Rp. 5000 \times 100 \text{ kg} = Rp. 500.000$ setara dengan 100 kg. Karena harga gabah akan selalu naik, petani menyimpan sebagian gabahnya untuk di makan sehari-hari sampai panen selanjutnya tiba, jika panen selanjutnya tiba namun sisa gabah masih banyak maka petani akan menjual sisa gabah yang panen sebelumnya dan harga sisa gabah itu akan mengikuti harga gabah yang panen selanjutnya atau harganya lebih tinggi dari panen pada bulan Mei tersebut. Bisa saja saat itu uang Rp. 500.000 mendapatkan 100

kg pada panen selanjutnya uang Rp. 500.000 hanya mendapatkan kurang lebih 71 kg.

Lima bulan kemudian hutang sudah jatuh tempo harga gabah telah naik menjadi Rp. 6000 – Rp. 7000/kg misalkan ambil harga Rp. 7000/kg sehingga jikalau di hitung perkilo Rp. 500.000 hanya akan mendapat gabah kurang lebih 71 kg, $Rp. 7000 \times 71 \text{ kg} = Rp. 497.000$. Sehingga perhitungannya begini, pada saat bulan Januari atau ketika terjadinya transaksi hutang piutang ini Rp. 500.000 setara dengan gabah 100 kg dengan harga perkilo gabah Rp. 5000 $\times 100 \text{ kg} = Rp. 500.000$. Jadi pada saat bulan Januari Rp. 500.000 sama dengan 100 kg gabah. Pada saat 4 bulan kemudian atau ketika hutang sudah jatuh tempo harga gabah naik menjadi Rp. 7000/kg sehingga jika di kalikan $Rp. 7000 \times 100 \text{ kg} = Rp. 700.000,-$ jadi ketika sudah 4 bulan kedepan 100 kg gabah sama dengan Rp. 700.000,-. Jadi terdapat selisih Rp. 200.000 antar ketika terjadinya transaksi hutang piutang dengan tanggal jatuh temponya 4 bulan kedepan.

Dalam transaksi ini ikatan antara pihak yang berhutang dengan pihak yang memberi hutang tidak dilakukan secara tertulis melainkan dengan rasa saling percaya satu sama lain. Rasa saling percaya ini tumbuh karena pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah sama-sama warga desa sendiri yang memiliki sawah di sana.

4. Cara *Ijab Qabul* Transaksi hutang piutang di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Dalam melakukan akad hutang piutang uang dibayar gabah, pihak yang akan berhutang datang kepada tetangga mereka yang bekerja sebagai pedagang atau pegawai negeri yang lebih mampu dari pada mereka (pemberi hutang), dan meminta untuk memberi pinjaman uang, untuk biaya perawatan sawah atau untuk biaya hidup sehari-hari. *Ijab Qabul* dalam transaksi ini hanya dihadiri oleh pihak yang berhutang dan yang memberi hutang, dan didasari oleh rasa saling percaya mereka sama-sama tidak mencatat transaksi tersebut.

Dalam melakukan *Ijab Qabul* kedua belah pihak menyepakati tanggal yang kapan hutang akan dibayar, seperti yang sudah saya jelaskan diatas awal terjadinya transaksi hutang piutang ini hanyalah hutang piutang uang biasa namun ketika penghutang tidak bisa membayar hutangnya tepat pada tanggal jatuh tempo maka yang memberi hutang akan meminta pelunasan barang atau gabah yang penghutang punya karena memang mayoritas petani yang melakukan hutang untuk merawat sawahnya atau untuk biaya hidup sehari-harinya karena pendapatan petani tidak selalu ada setiap hari. Maka dari itu petani biasa minta tolong terhadap tetangga yang sekiranya bisa menolong atau bisa memberikan pinjaman uang kepadanya.

ketika hutang tidak bisa dibayar tepat waktu pada saat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, hutang piutang ini akad awal menggunakan akad hutang piutang uang dibayar uang namun ketika orang yang berhutang tidak bisa membayar tepat waktu dengan yang disepakati ada pergantian akad dari yang awal akad hutang piutang biasa menjadi hutang piutang dibayar gabah, karena ketika orang yang berhutang tidak bisa membayar dengan uang maka yang memberikan hutang akan meminta dibayar dengan sisa gabah yang penghutang panen pada musim panen pertama, akan tetapi orang yang memberi hutang memberikan syarat jika membayar dengan gabah maka ia akan meminta dibayar gabah dengan harga yang lebih rendah karena mengikuti harga ketika musim panen gabah dengan begitu bisa jadi harganya dua kali lipat dari hutangnya atau terdapat kelebihan ketika gabah ditakar dengan uang.

Ketika akad awal akan diganti dengan akad yang baru harusnya mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak atau hak untuk memilih dan memperhatikan rukun dan syarat-syarat pada akad *al qardh* sudah terpenuhi atau akad yang baru akan menyimpang dari akad *qardh* yang benar menurut syar'iah Islam yang sudah diatur oleh Al Qur'an dan Hadis Nabi atau demi kemaslahatan, para ulama menjima'kan agar menemukan jalan yang mempermudah orang muslim bermuamalah atau melakukan akad *al Qardh* itu sendiri. Sedangkan syarat dan rukun muamalah itu harus ada pada akad itu sendiri jika salah satu syarat dan rukun akad itu tidak ada maka akad *al Qardh* itu sendiri akan batal.

secara cuma-cuma, akan tetapi ia memberikan hutang yang harus dibayar suatu saat.

Akad yang terjadi didalam transaksi hutang piutang yang dibayar dengan gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, orang yang membutuhkan pinjaman sejumlah uang atau orang yang berhutang sejumlah uang, dan orang yang memberikan meminjamkan sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan pinjaman uang tersebut. Dalam akad ini kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan dan meskipun ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akan tetapi transaksi semacam ini sudah biasa dilakukan di Desa Metaos jadi ketika penghutang meminta dilunasi dengan gabah mereka sudah mengetahuinya atau tidak ada paksaan dalam melakukan kesepakatan itu sendiri, maka menurut hukum Islam akad dalam transaksi ini sudah terpenuhi. Akan tetapi didalam transaksi ini kedua belah pihak yang melakukan akad ini tidak mencatatnya, sehingga ketika terjadi kesalahan atau cekcok antara keduanya mereka tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak adanya bukti kecuali ada saksi pada saat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam melakukan transaksi hutang piutang uang dibayar gabah di Desa Metaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, akad awal yang terjadi diantara mereka adalah hutang piutang biasa yang semestinya, hutang uang dan dibayar dengan uang, namun ketika

suatu saat yang berhutang tidak bisa membayar pada saat waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka akadnya diganti. Terjadi penawaran diantara keduanya, negoisasi tentang bagaimana baiknya hutang tersebut dan bagaimana caranya hutang tersebut lunas pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka pada saat awal kesepakatan. Negosiasi itu sendiri berisi tentang pemberi hutang akan meminta pelunasan hutang dengan gabah yang penghutang punya dengan sisa gabah dari panen sebelumnya karena penghutang tidak bisa melunasi hutangnya dengan berbentuk uang, akan tetapi orang yang memberikan hutang meminta dengan syarat akan mengambil gabah dengan harga ketika dulu pada saat terjadinya hutang piutang tersebut. Sehingga ketika dihitung bersama ada selisih harga gabah dengan hutang akan ada kelebihan gabah, karena tidak disesuaikan dengan harga gabah yang sekarang atau pada saat hutang telah jatuh tempo, karena semestinya harga gabah pada saat itu sudah lebih tinggi dari pada saat akad hutang piutang itu terjadi. Transaksi semacam ini terdapat selisih antara pengembalian uang dengan ketika pengembalian gabah karena patokan harga gabah yang mengikuti harga yang dulu, dari transaksi ini selisih hutang dengan pengembaliannya di syaratkan oleh orang yang memberi hutang. Akan tetapi persyaratan ini tidak dari awal akad karena akad awal hutang piutang biasa atau hutang piutang yang akan dilunasi dengan uang.

Para Fuqaha sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu pernyataan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (orang yang memberi hutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya maupun tambahan. Jika keuntungan tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf* menurut madzab Hanafi adalah boleh. Jika ada penambahan pelunasan yang dijanjikan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang), menurut syafi'iyah pihak yang memberi hutang makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang memberi hutang boleh menerimanya.

Dari transaksi hutang piutang tersebut ketika masyarakat yang berhutang tidak bisa melunasi pada tenggang waktu yang telah ditentukan maka mereka akan meminta pelunasan dengan sisa gabah yang mereka punya dengan syarat patokan harga gabah pada saat terjadi kesepakatan hutang piutang itu tadi. Karena transaksi ini tidak sesuai dengan akad awal atau kesepakatan awal dan ada pergantian akad maka menurut hukum Islam tidak boleh karena tidak sesuai dengan akad yang awal.

Dari pendapat ulama diatas menjelaskan kaitan masalah yang terdapat di desa Metaos, yang menjadi permasalahan ada persoalan selisih hutang tersebut termasuk riba atau tidak. Dari penjelasan diatas menurut Ulama Hanafiyah dibolehkan bila transaksi tersebut termasuk *urf* dan diperbolehkan menerima

tambahan dari pembayaran hutang yang telah diperjanjikan oleh pihak yang berhutang.

Karena memang pada dasarnya akad *Al Qardh* merupakan salah satu bentuk ibadah selain itu *Al Qardh* juga merupakan kegiatan sosial, maka orang yang memberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya ketika sudah jatuh tempo. Hal itu karena akad *Al Qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula hutang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Namun menurut ulama Hanfiah sah-sah saja mengundurkan akad *Al Qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi tertentu. Menurut pendapat Imam Malik akad *Al Qardh* boleh diundur dengan penangguhan akan tetapi dengan alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *Al Qardh* baik melangsungkan, menghentikan maupun meneruskan akad.

Karena hutang sudah jatuh tempo atau sudah sampai pada waktu untuk membayar dan penghutang belum bisa membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan ini pemberi hutang meminta untuk melunasi hutang uangnya dengan sejumlah sisa gabah yang mereka punya sebagai ganti untuk melunasi hutang

rukun dan syarat akad hutang piutang (*al Qardh*) yang sesuai dengan Al Qur'an dan assunnah.

Kedudukan fatwa ulama tidak terlepas dari kedudukan ulama dalam Islam, selain itu juga untuk rujukan hukum fatwa juga berfungsi sebagai dalil mujtahid bagi orang awam, namun fatwa juga bisa berubah sewaktu-waktu, mengikuti tempat, tradisi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Melihat ketentuan fatwa DSN yang telah penulis jadikan acuan, tidak sesuai karena menurut fatwa ini hutang piutang adalah upaya sosial atau akad saling tolong menolong antara sesama manusia tidak untuk mencari keuntungan satu sama lain apalagi untuk orang yang yang membrikan hutang tidak boleh mensyaratkan keuntungan kecuali orang yang berhutang memberikan hadiah tanpa ada persyaratan diawal akad, jika seperti ini hukumnya boleh karena tidak merugikan salah satu pihak namun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Metaos tidak sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut karena ada salah satu pihak yang mendapat keuntungan dari transaksi hutang piutang tersebut dengan meminta mensyaratkan akan mengambil gabah dengan harga yang lebih murah atau mengikuti harga ketika awal terjadinya hutang putang tersebut. Sedangkan didalam hal pengembalian *muqtaridh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang ia pinjam atau yang ia hutang. Namun melihat dari sifat fatwa itu sendiri yang akan berubah sewaktu-waktu yang mengikuti tempat, tradisi dan kondisi, jadi

hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Didalam ketentuan umum fatwa DSN akad *Al Qardh* menjelaskan bahwa *Al Qardh* merupakan akad hutang piutang atau pinjaman yang diberikan *muqtaridh* kepada *muqridh* yang memerlukan. Dan *muqridh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang dipinjamnya atau uang yang dihutangnya pada saat waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Ada perbedaan di antara keduanya antar praktek yang dilakukan di luar instansi dengan di dalam instansi yang menerapkan akad *Al Qardh* didalamnya. Praktek hutang piutang seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat desa, salah satunya adalah desa Metaos dan mereka tidak memperhatikan kaidah akad yang ada didalam syari'ah dan didalam fatwa atau pendapat ulama yang berlaku didalam hukum Islam. Banyak dari masyarakat desa adalah orang awam yang tidak tahu dan memperhatikan bagaimana rukun dan syarat *Al Qardh* karena didesak dengan kebutuhan yang mereka alami sehingga apapun akan dilakukan oleh mereka agar bisa memenuhi kebutuhan itu.

Jika menurut fatwa ini memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah tujuan akad *Al Qardh* karena akad tolong menolong antar sesama manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi ini. Karena didalam Al Qur'an juga menjelaskan tentang hutang piutang itu boleh dilakukan akan tetapi untuk menolong orang yang

sedang membutuhkan. Didalam fatwa ini juga dijelaskan jika di suatu LKS (Lembaga Keuangan Syariah) nasabah tidak mampu untuk membayarnya maka LKS (Lembaga Keuangan Syariah) memberikan dua pilihan, yang pertama memperpanjang masa pengembalian hutang, yang kedua menghapus hutangnya itu jika di LKS, namun jika diterapkan di masyarakat Desa Metaos bukan lembaga melainkan transaksi hutang piutang orang dengan orang, *muqridh* sebagai penyedia dana atau orang yang memberikan pinjaman bisa diibaratkan dengan LKS, dan *muqtaridh* sebagai nasabah atau orang yang meminjam uang.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Metaos ini sebenarnya sudah memenuhi syarat yang ada didalam fatwa tersebut akan tetapi ketika tidak bisa melunasi pada waktu yang telah ditentukan diawal maka ada cara kedua untuk melunasi hutang itu sendiri dengan cara mengambil gabah yang *muqtarid* punya dengan ketentuan harga yang lebih rendah atau dengan patokan harga saat terjadinya hutang piutang dahulu, akibatnya jika dihitung dan dibandingkan dengan harga gabah yang sekarang dengan harga gabah yang dulu lebih mahal yang sekarang. Jika dulu yang awalnya hanya mendapatkan gabah dua kwintal sekarang bisa hanya mendapatkan gabah 1,5 kwintal terdapat selisih antara harga gabah dulu dengan sekarang, lebih mahal yang sekarang jadi terjadi selisih antara pelunasan uang dengan gabah, jika pelunasan dilakukan dengan gabah maka akan memperoleh gabah

dengan harga murah atau sesuai dengan harga pada saat terjadi hutang piutang tersebut, namun jika dilunasi dengan uang maka akan tetap karena kesepakatan awal tidak ada perjanjian dibayar dengan gabah akan tetapi pelunasan gabah ini solusi ketika tidak bisa melunasi dengan uang tersebut. Kasus ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/IV/2001 yang mana nasabah harus mengembalikan sesuai dengan yang ia pinjam akan tetapi ketika dia mau melunasi dia memberikan lebih sebagai hadiah dan tidak disyaratkan pada saat awal akad itu boleh-boleh saja karena tidak ada paksaan untuk membayar lebih atau memberikan hadiah. Karena ini kemauan *muqtarid* untuk melunasi hutang tersebut maka boleh dengan solusi yang lain karena sifat fatwa ini sendiri akan berubah sesuai dengan waktu dan tempatnya.

2. Analisis Pendapat Ulama

Ada perbedaan pendapat para ulama tentang transaksi akad *Al Qardh*, menurut Ulama Hanafiyah *Qardh* bisa dikatakan sah apabila harta *mitshil*, yaitu harta yang tidak akan terjadi perbedaan nilai contohnya harta yang ditimbang, ditakar dan dihitung, selain harta yang diatas menurut Ulama Hanafiyah tidak sah seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah karena mereka akan berubah nilainya suatu waktu entah itu ketika hewan akan lebih besar atau pohon akan semakin tinggi tumbuhnya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah *qardh* boleh pada setiap benda

